

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkembangan politik memperlihatkan perubahan-perubahan mendasar: (a) demokrasi parlementer pada tahun 1950-an diakhiri dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945, (b) yang dipraktekkan secara otoriter melalui “Demokrasi Terpimpin”; lalu setelah tragedi 1965, (c) Suharto dengan Orde Baru menjalankan “Demokrasi Pancasila” yang sama tidak demokratis dan hanya prosedural; dan (d) pada Mei 1998 dimulai Reformasi Nasional. Di era reformasi bertarung kekuatan-kekuatan progresif yang mengharapkan Pancasila tetap menjadi dasar ideologis dan dijalankan sebagaimana mestinya dalam proses pengembangan demokrasi dengan kekuatan Islam politik yang memperjuangkan ideologi Islam dan kekuatan Orde Baru. Ditengarai bahwa reformasi politik justru dibajak oleh elit politik Orde Baru dan kalangan oportunistis memanfaatkan demokrasi prosedural sebagai pertarungan kepentingan pribadi atau golongan. Rezim Orde Baru menyederhanakan sistem kepartaian politik dalam Golongan Karya (golkar), PPP, dan PDI. Namun di era Reformasi berbagai kalangan membentuk partai politiknya masing-

masing. Pada pemilu tahun 2009 bertarung 38 partai politik nasional dan 6 partai lokal di Provinsi Aceh.¹

Salah satu agenda politik penting di Indonesia dewasa ini adalah pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Dilihat dari perspektif sebagian besar rakyat Indonesia yang hidupnya masih dililit oleh berbagai kesulitan yang membuat mereka kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia seperti rendahnya pendapatan perkapita masyarakat, pemilihan langsung ini adalah sebuah *kairos*. Melalui pemilihan itulah masyarakat dapat mengukur kemungkinan apakah nasibnya bisa berubah atau tidak. Akan tetapi banyak kalangan juga yang mulai gelisah dan mempertanyakan apakah mungkin agenda politik itu akan berlangsung dengan aman, tertib, adil, dan demokratis. Atau dengan kata lain dapat ditanyakan apakah rakyat sebagai penentu atas nasib mereka sendiri dapat memilih secara mandiri sesuai dengan hati nurani tanpa termanipulasi oleh janji-janji politik yang murahan?²

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh peran aktif warganya, salah satunya adalah melalui politik. Politik dapat menjadi sarana bagi setiap warga negara untuk mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Partisipasi politik rakyat akan memainkan peranan penting. Partisipasi politik merupakan semua aktivitas warga negara dalam rangka mempengaruhi kebijakan umum serta penentuan penguasa politik dan kekuasaan dalam

¹ Zakaria J. Ngelow dkk., *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru* (Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013) hlm. 293

² Julianus Mojau, *Teologi Politik Pemberdayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2009) hlm. 96-

masyarakat. Tidak ada cara lain yang lebih mudah untuk menyatakan peran dalam pemerintahan, kecuali terjun ke dalam dunia politik.³ Partisipasi politik salah satunya diwujudkan dalam keikutsertaan menyukseskan pemilihan umum (pemilu). Melalui Pemilu, setiap warga negara bertanggungjawab menentukan pemimpin untuk mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Masyarakat memiliki andil besar terhadap arah visi dan misi negaranya. Masyarakat tidak seharusnya berdiam diri. Masyarakat mempunyai peran dan kedudukan penting dalam kehidupan politik bangsa. Untuk mewujudkan semua hal ini masyarakat harus berperan dengan terjun langsung dalam arena politik khususnya melalui pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Masyarakat bertanggungjawab memberikan hak suaranya dengan menentukan pilihannya untuk memilih pemimpin badan eksekutif maupun legislatif.

Penelitian awal yang penulis lakukan menunjukkan bahwa masyarakat Sandabilik memang telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pelaksanaan pemilu. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah semua itu dilandasi oleh pemahaman yang benar bahwa partisipasi masyarakat berdampak pada kebijakan pemerintah, atau hanya karena ada sesuatu yang diinginkan, atau juga karena ada mobilisasi politik yang tidak sehat? Mungkinkah partisipasi politik masyarakat dimobilisasi dengan memberi uang dalam nominal tertentu (*money politic*), ataukah masyarakat mendapat tekanan dari oknum tertentu sehingga mau berpartisipasi dalam kegiatan pemilu?

³ Parel T. J. dan Maidiantius T. J., *Politik Yesus bagi Indonesia* (Tangerang: Matana Bina Utama, 2014) hlm. 8

Hal-hal yang telah diuraikan di atas membuat penulis tertarik mengkaji kemudian mengkritisi kualitas partisipasi politik masyarakat Kelurahan Sandabilik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana kualitas partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Sandabilik?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini ialah: Menjelaskan kualitas partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Sandabilik.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademis

Skripsi ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi pengembangan mata kuliah Gereja dan Politik.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran dan motivasi kepada masyarakat secara umum dan warga Kelurahan Sandabilik secara khusus agar secara aktif berpartisipasi dalam dunia perpolitikan.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data sekunder melalui buku-buku ilmiah, majalah dan ulasan yang berhubungan dengan pokok bahasan skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini diupayakan agar lebih sistimatis dan konsisten, oleh karena itu sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Kerangka Teori yang terdiri dari definisi politik, sejarah politik dalam Alkitab, partisipasi politik dalam konteks negara demokratis dan partisipasi politik warga gereja.
- BAB III : Metodologi Penelitian yang memaparkan tentang metode penelitian yang penulis gunakan di lapangan untuk mengumpulkan data.

BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Pemaparan Hasil Penelitian dan Analisis (Kajian Kritis).

BAB V : Penutup yang memuat hasil kesimpulan dan saran.